



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEBIJAKAN DBH

**SUBDIT DBH
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

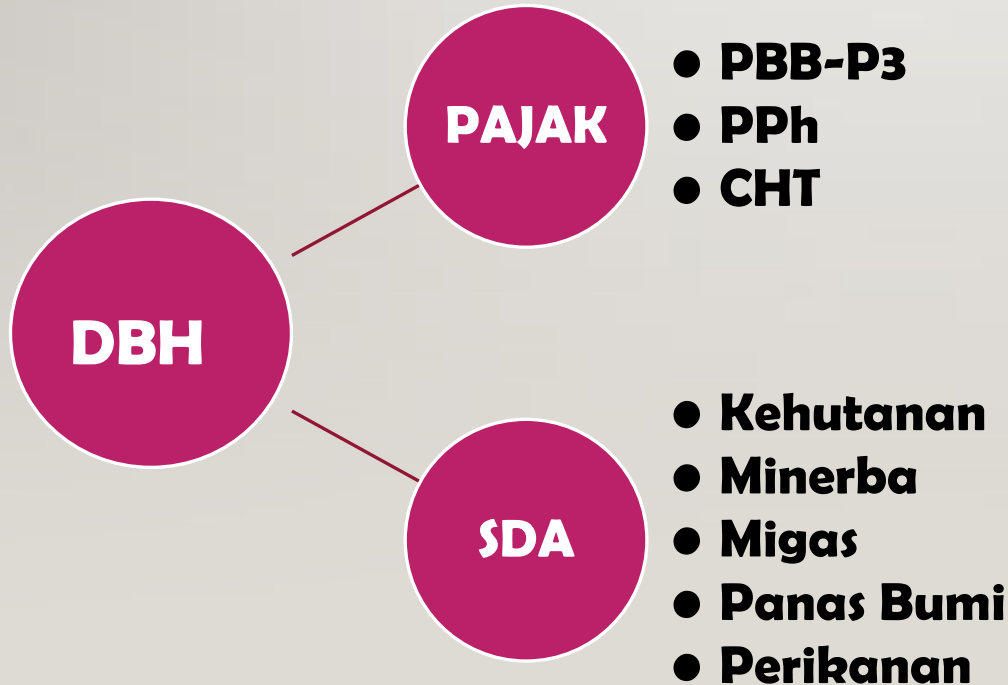
DASAR HUKUM DBH

- UU No. 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005
Dana Perimbangan
- PMK No. 50/PMK.07/2017
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

DANA BAGI HASIL

Pengertian:

DBH merupakan pendapatan APBN yang **dialokasikan kepada daerah** berdasarkan angka persentase **untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.**



Tujuan:

Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

✓ PEMBAGIAN : By Origin

- DBH PBB dan PPh dibagi kepada **daerah penghasil sesuai dengan porsi** yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.
- DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan **Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar**, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

✓ PENYALURAN: Based on Actual Revenue

Penyaluran DBH **berdasarkan realisasi penerimaan** tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004)

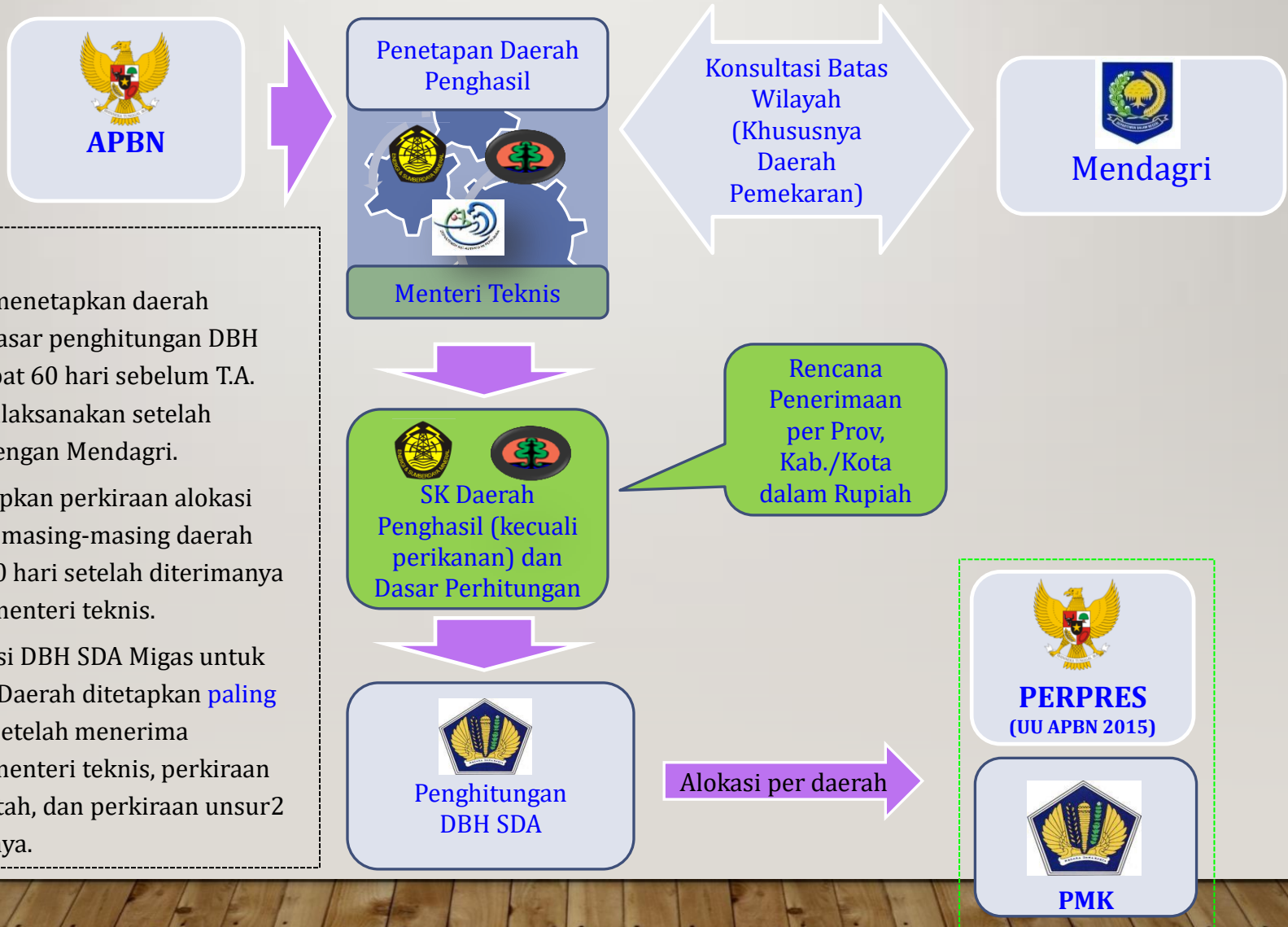
PORSI DBH ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KAB/KOTA

No.	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU 33/2004				
		Pusat	Prov.	K/K Penghasil	Biaya Pungut	Pemerataan K/K Lain
I.	PAJAK					
1	PPH Pasal 21 dan 25/29	80	8	12		
2	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16,2	64,8	9	
3	Cukai Hasil Tembakau	98	0,6	0,8		0,6
II	SDA					
1	Kehutanan					
a	IIUPH	20	16	64		-
b	PSDH	20	16	32		32
c	Dana Reboisasi	60	40*	40		-
2	Mineral dan Batubara					
a	Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)					
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	64		-
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	80			
b	Iuran Produksi (Royalti)					
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	32		32
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	26			54
c	Dari Kawasan Perhutanan					
3	Perikanan	20	-	-		80
4	Minyak Bumi					
	- darat dan laut <4 Mil	84,5	3,1	6,2		6,2
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	84,5	5,17			10,33
5	Gas Bumi					
	- darat dan laut <4 Mil	69,5	6,1	12,2		12,2
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	69,5	10,17			20,33
6	Panas Bumi	20	16	32		32

*) Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil.

MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH SDA

(PP 55/2005 dan UU APBN 2015)

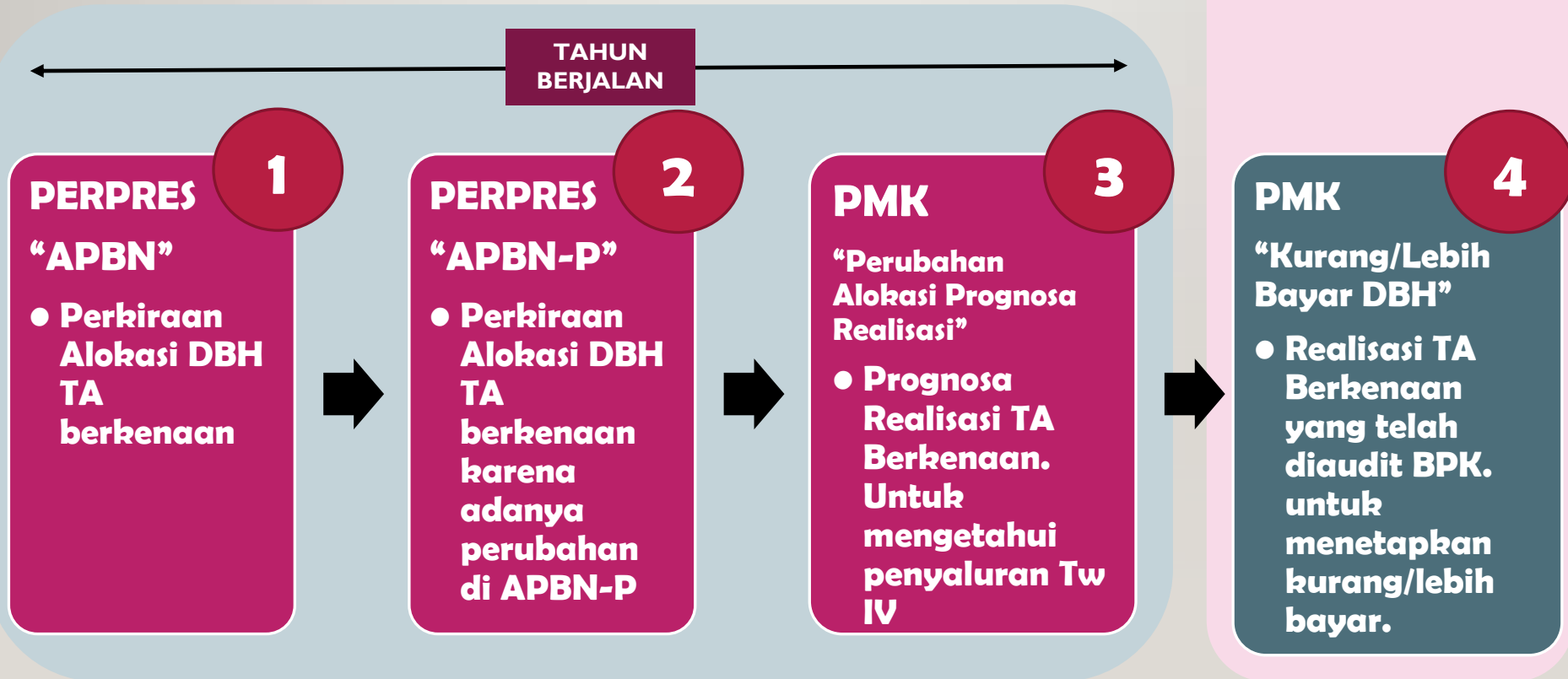


Pasal. 27:

- Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum T.A. bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Mendagri.
- Menkeu menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
- Perkiraan alokasi DBH SDA Migas untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur2 pengurang lainnya.

SIKLUS PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DBH

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2017,
empat jenis penghitungan dan penetapan DBH



SIKLUS PENYALURAN DBH

Jenis DBH	Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
DBH PAJAK													
PPh & CHT	Triwulan			25%			25%			≤30% *)			sisa
PBB Migas & panas bumi	triwulan			25%			25%			≤30%*)			sisa
PBB P3 bagirata	3 tahap				30%				50%			sisa	
PBB P3 Bagian daerah	mingguan								Mulai Agustus				
DBH SDA													
DBH SDA (selain Perikanan dan Kehutanan)	Triwulan			25%			25%			≤30%*)			sisa
DBH SDA Perikanan dan Kehutanan)	Triwulan			15%			15%			15%			sisa

Ket *): Penyaluran paling tinggi 30% dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara semester I

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH

UU No 33/2004:

**Penggunaan tambahan
DBH SDA Migas sebesar
0,5% hanya untuk
pendidikan dasar**

PERLUASAN

**UU No 18/2016
APBN TA 2017**

- **Tambahan DBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*).**
- **Tujuan : mengembalikan fungsi DBH sebagai block grant.**

SUMBER PNBP SDA YANG DIBAGIHASILKAN

DBH SDA

KEHUTANAN

PERIKANAN

MINERBA

MIGAS

PANAS BUMI

Kehutanan

- Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
- Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- Penerimaan Dana Reboisasi (DR)

Perikanan

- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

Mineral dan Batubara

- Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
- Penerimaan Royalti (*Royalty*)

Pertambangan Migas

- Penerimaan SDA Minyak Bumi (- DMO, *Fee UHM*, Pajak-Pajak)
- Penerimaan SDA Gas Bumi (- DMO, *Fee UHM*, Pajak-Pajak)

Pertambangan Panas Bumi

- Setoran Bagian Pemerintah (- kewajiban pajak dan pungutan lain)
- Iuran Tetap dan Iuran Produksi

DBH SDA MINERBA

PENGERTIAN DAN JENIS DBH SDA MINERAL DAN BATU BARA

DBH SDA Mieral dan Batu Bara (Minerba):

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti), yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

LAND-RENT:

Iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum.

ROYALTI:

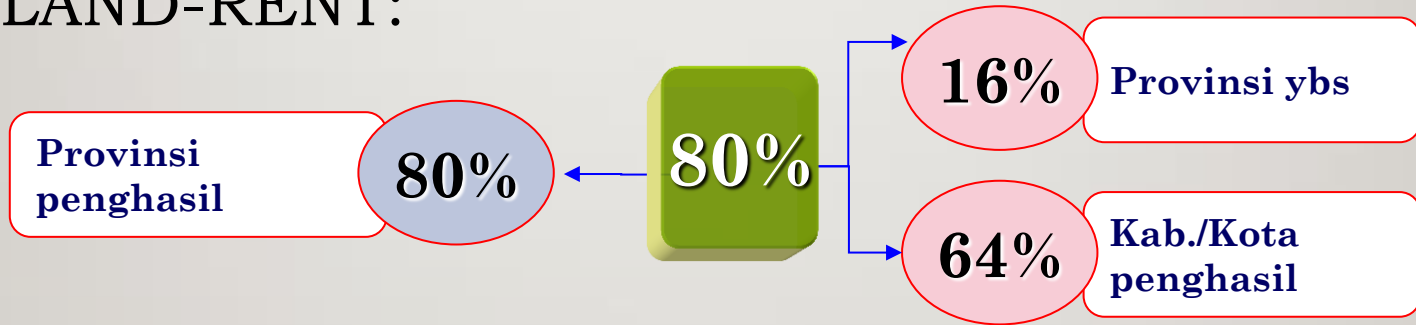
Iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

PORSI PEMBAGIAN DBH SDA MINERBA

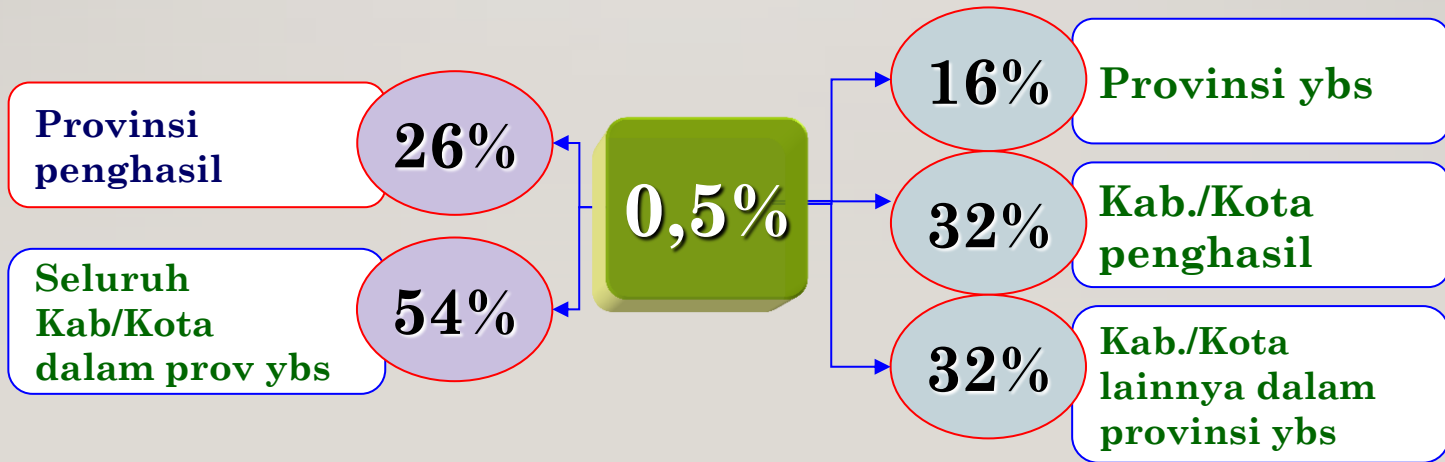
**Daerah Penghasil:
Provinsi**

**Daerah Penghasil:
Kab./Kota**

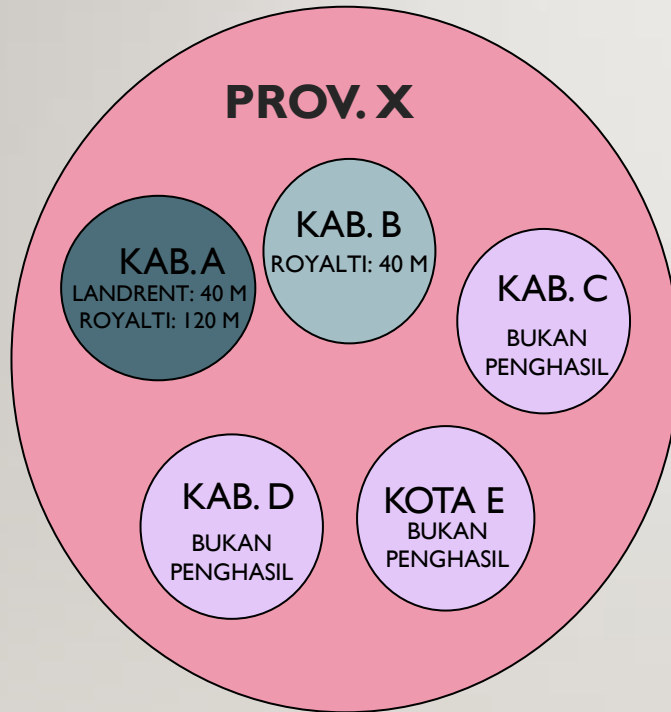
LAND-RENT:



ROYALTY:



SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA DAERAH PENGHASIL KAB/KOTA(I)



I. LAND RENT

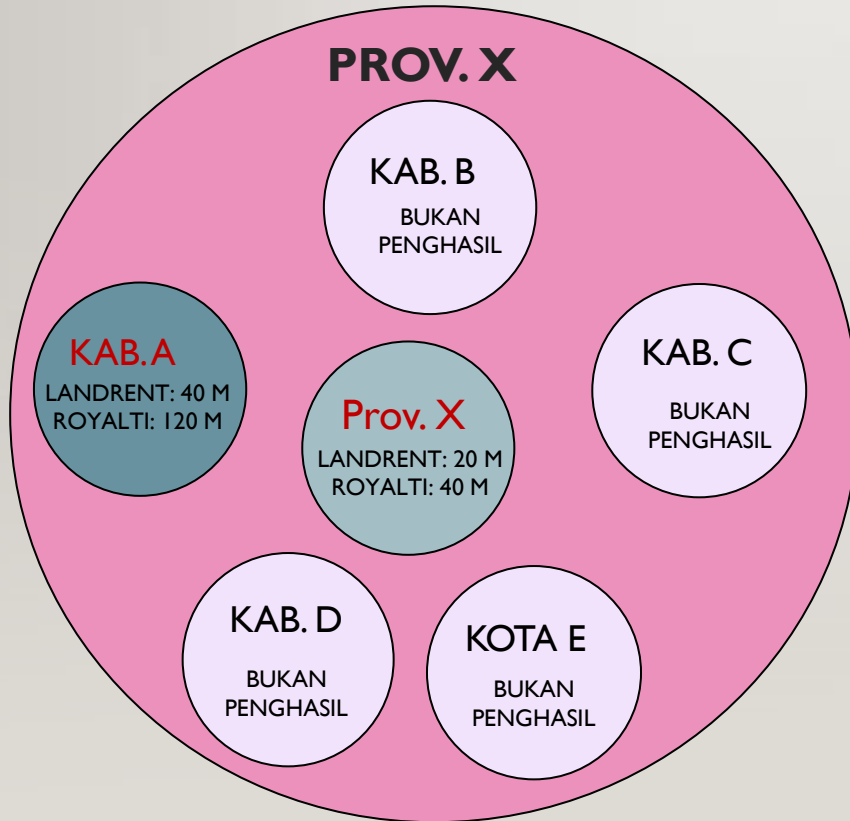
Daerah	Penerimaan Landrent	DBH Landrent
Kab. A	40 M	25,6 M (64% x 40 M)
Kab. B	-	-
Kab. C	-	-
Kab. D	-	-
Kota E	-	-
Prov. X	-	6,4 M (16% x 40 M)
Jumlah	40 M	32 M

SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA DAERAH PENGHASIL KAB/KOTA(2)

2. ROYALTI

DAERAH	PENERIMAAN ROYALTI	DBH ROYALTI			
		BAGIAN PENGHASIL	BAGIAN PEMERATAAN		JUMLAH
Kab.A	120 M	38,4 M (32% x 120 M)	Dari Kab B	3,2 M (32%*40 M)/4	41,6 M
Kab. B	40 M	12,8 M (32% x 40 M)	Dari Kab A	9,6 M (32%*120 M)/4	22,4 M
Kab. C	-	-	Dari Kab A	9,6 M	12,8 M
			Dari Kab B	3,2 M	
Kab. D	-	-	Dari Kab A	9,6 M	12,8 M
			Dari Kab B	3,2 M	
Kota E	-	-	Dari Kab A	9,6 M	12,8 M
			Dari Kab B	3,2 M	
Prov. X	-	-	-	-	25,6 M (16% x 160 M)
Jumlah	160 M				128 M

SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA DAERAH PENGHASIL PROVINSI(I)



I. LAND RENT

DAERAH	PENERIMAAN LANDRENT	DBH LANDRENT
Kab. A	40 M	25,6 M (64% x 40 M)
Kab. B	-	-
Kab. C	-	-
Kab. D	-	-
Kota E	-	-
Prov. X	20 M	16 M (80% x 20 M)
		Dari KAB. A: 6,4 M (16% x 40 M)
Jumlah	60 M	48 M

SIMULASI PERHITUNGAN DBH SDA MINERBA DAERAH PENGHASIL PROVINSI(2)

2. ROYALTI

DAERAH	PENERIMAAN ROYALTI	DBH ROYALTI				
		BAGIAN PENGHASIL		BAGIAN PEMERATAAN		JUMLAH
Kab.A	120 M	38,4 M (32% x 120 M)		Dari Prov. X	4,32 M (54%*40 M)/5	42,72 M
Kab. B	-	-		Dari Kab A	9,6 M (32% x 120 M)/4	13,92 M
				Dari Prov. X	4,32 M	
Kab. C	-	-		Dari Kab A	9,6 M	13,92 M
				Dari Prov. X	4,32 M	
Kab. D	-	-		Dari Kab A	9,6 M	13,92 M
				Dari Prov. X	4,32 M	
Kota E	-	-		Dari Kab A	9,6 M	13,92 M
				Dari Prov. X	4,32 M	
Prov. X	40 M	Dari Prov. X	10,4 M (26% x 40 M)	-	-	29,6 M
		Dari Kab.A	19,2 M (16% x 120 M)	-	-	
Jumlah	160 M					128 M

DBH SDA MIGAS

PENGERTIAN DAN JENIS DBH SDA MINYAK DAN GAS BUMI

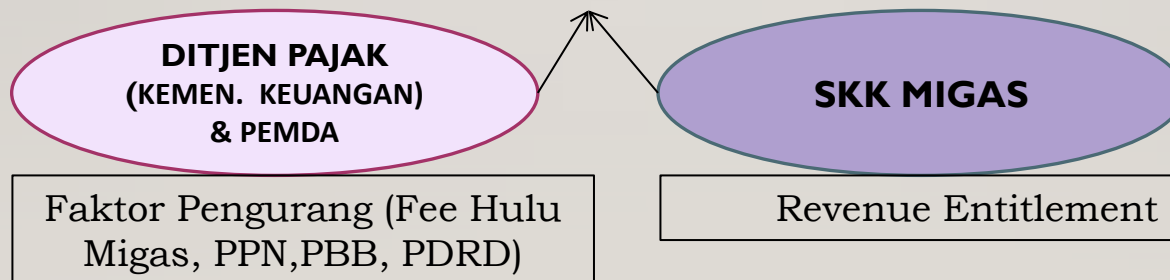
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas):

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

❑ Penyediaan Data Teknis

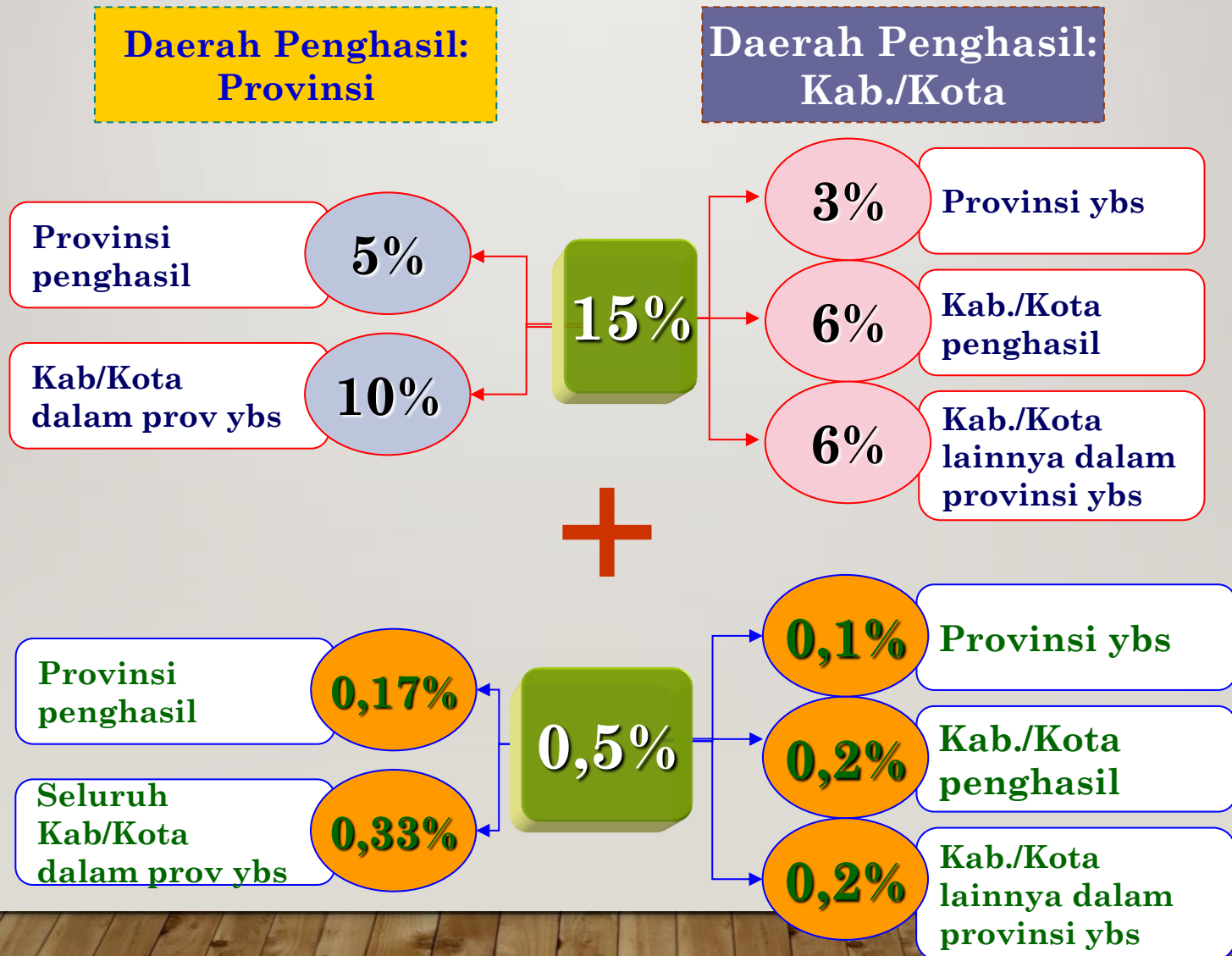
(1) DITJEN MIGAS (KEMEN. ESDM) → Data Lifting

(2) DITJEN ANGGARAN (KEMEN. KEUANGAN) → Data PNBP

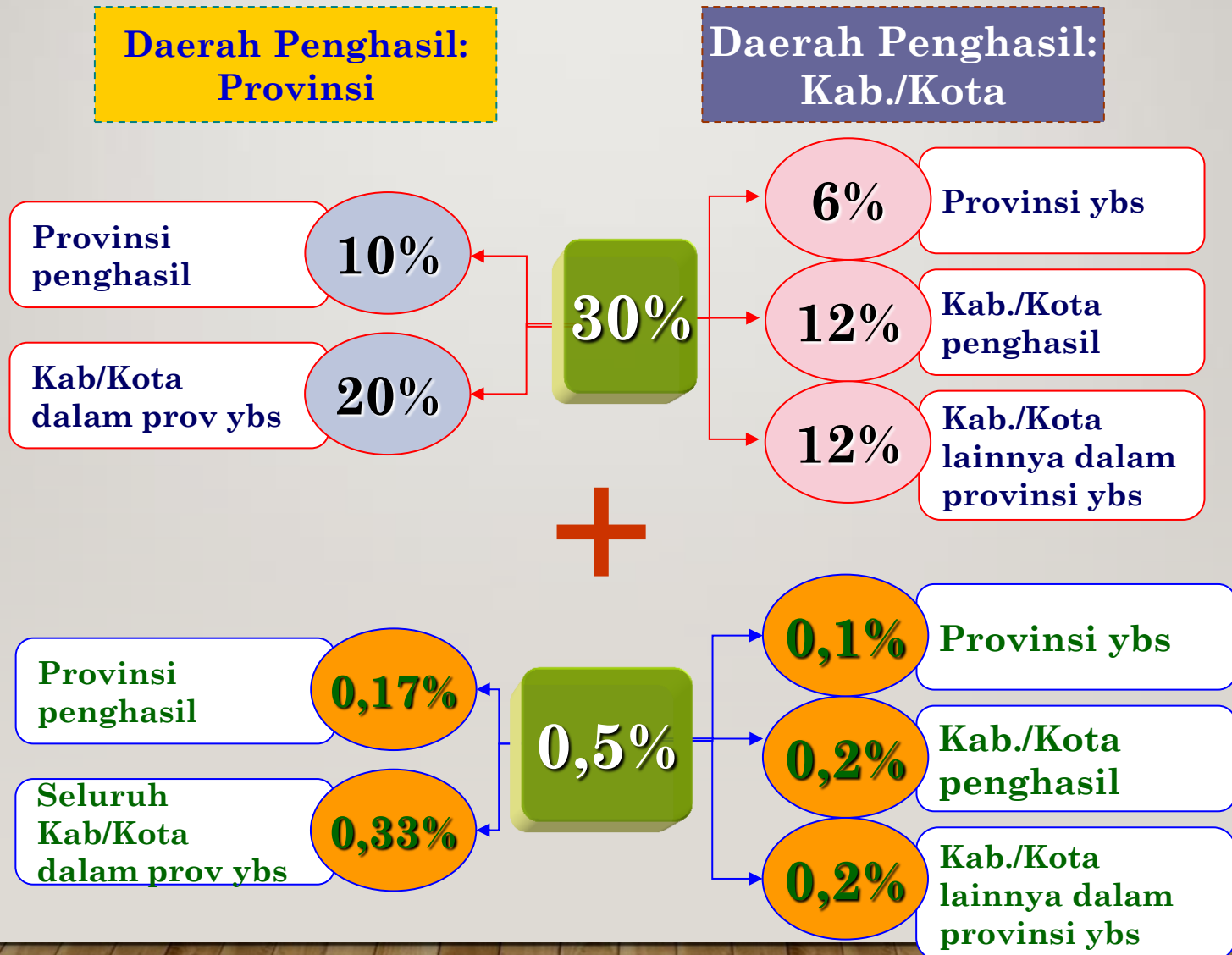


❑ Penghitungan Dan Penetapan Alokasi DBH Migas Oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (KEMEN. KEUANGAN)

PORSI PEMBAGIAN DBH SDA **MINYAK BUMI**



PORSI PEMBAGIAN DBH SDA **GAS BUMI**



JENIS DATA UNTUK MENGHITUNG DBH

- dari Ditjen Migas :

- Lifting dan/atau Gross Revenue

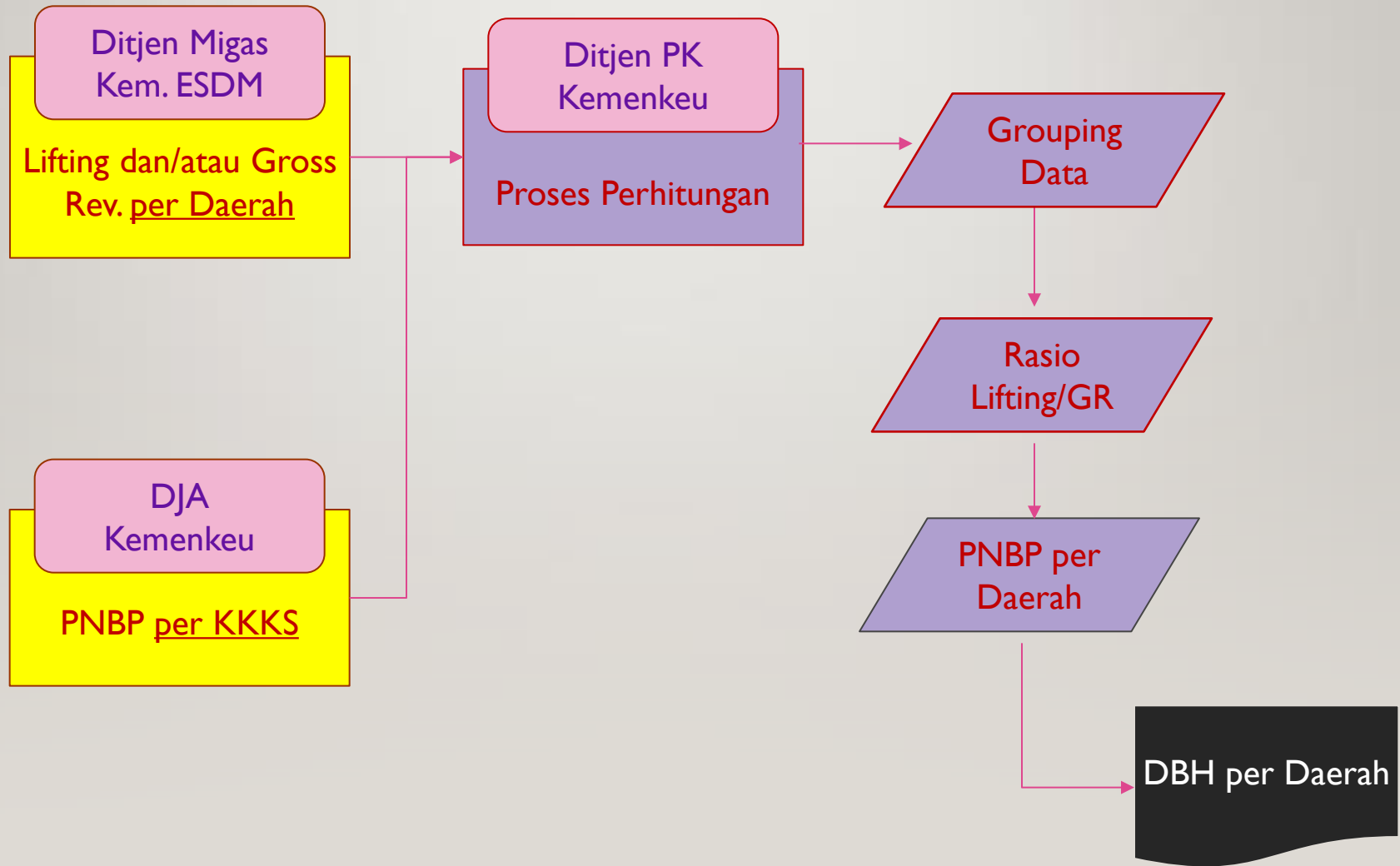
- per daerah penghasil
 - per KKKS
 - Per jenis minyak

- dari Ditjen Anggaran:

- Realisasi Penerimaan SDA Migas

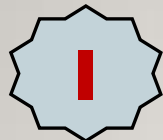
- per KKKS
 - Per jenis minyak

MEKANISME PERHITUNGAN DBH SDA MIGAS



PROSES PERHITUNGAN DBH SDA MIGAS

1	Grouping Data
2	Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil
3	Menghitung DBH berdasarkan persentase sesuai dengan UU dan PP
4	Penyaluran Ke Daerah



Melakukan Grouping Data

DITJEN MIGAS - Kem. ESDM

DAERAH PENGHASIL	KKKS	JENIS MINYAK
DKI JAKARTA	<i>PHE ONWJ</i>	<i>ARJUNA</i>
DKI JAKARTA	<i>PHE ONWJ</i>	<i>NORTH WEST C</i>
INDRAMAYU	<i>PHE ONWJ</i>	<i>ARJUNA</i>
KARAWANG	<i>PHE ONWJ</i>	<i>ARJUNA</i>

DIT. PNBP - DJA Kemenkeu

KKKS	JENIS MINYAK
<i>PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ</i>	<i>ARJUNA</i>
<i>PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ</i>	<i>N.W CORNER / CINTA</i>

DIT. DAPER - DJPK Kemenkeu

KKKS	JENIS MINYAK	DAERAH PENGHASIL
<i>PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ</i>	<i>ARJUNA</i>	DKI JAKARTA
	<i>ARJUNA</i>	INDRAMAYU
	<i>ARJUNA</i>	KARAWANG
	<i>NORTH WEST C</i>	DKI JAKARTA



Menghitung Rasio dan proporsi Penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil

Data PNBP yang diterima dari Dit. PNBP – DJA adalah PNBP PER KKKS

Data tersebut dikonversi menjadi angka PNBP PER DAERAH, menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBP PER KKKS ke masing-masing daerah penghasil

Untuk perhitungan Perkiraan Alokasi digunakan RASIO LIFTING, Sedangkan untuk perhitungan Realisasi, karena realisasi PNBP per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan RASIO GROSS REVENUE.

CONTOH HITUNG RASIO

NO	KKKS	JENIS MINYAK	DAERAH PENGHASIL	LIFTING (ribu barrel)	RASIO
28	PERTAMINA HULU ENERGY - N.W. Java Sea			13.322,50	
	PERTAMINA HULU ENERGY - N.W. Java Sea	KRESNA CONDENSAT		56,00	100,0000%
	PHE ONWJ	Kresna Condensat	PROV. JAWA BARAT	56,00	100,0000%
	PERTAMINA HULU ENERGY - N.W. Java Sea	ARJUNA		13.266,50	100,0000%
	PHE ONWJ	ARJUNA	PROV. DKI JAKARTA	1.300,90	9,8059%
	PHE ONWJ	ARJUNA	KAB. INDRAMAYU	-	0,0000%
	PHE ONWJ	ARJUNA	KAB. KARAWANG	31,55	0,2378%
	PHE ONWJ	ARJUNA	PROV. JAWA BARAT	6.201,00	46,7418%
	PHE ONWJ	ARJUNA	PEMERINTAH PUSAT	5.733,05	43,2145%

CONTOH HITUNG PORSI PENERIMAAN SDA MIGAS PER DAERAH PENGHASIL

						(dalam rupiah)
NO.	DAERAH PENGHASIL	KKKS	JENIS MINYAK	RASIO LIFTING	PENERIMAAN SDA MINYAK BUMI PER KKKS	PENERIMAAN SDA MINYAK BUMI PER DAERAH
VIII.	JAWA BARAT					289.261.864.469
	KAB. INDRAMAYU					141.903.885.868
	KAB. INDRAMAYU	PT PERTAMINA EP	Jatibarang	5,6507%	2.496.152.515.094	141.051.209.806
	KAB. INDRAMAYU	PT PERTAMINA EP - KSO AXIS SAMBIDOYONG	Jatibarang	0,0342%	2.496.152.515.094	852.676.062
	KAB. KARAWANG					55.216.412.381
	KAB. KARAWANG	PT PERTAMINA EP	Jatibarang	1,2961%	2.496.152.515.094	32.352.388.708
	KAB. KARAWANG	PT PERTAMINA EP - RDL / MB-T2	Arjuna	0,7087%	2.496.152.515.094	17.690.401.560
	KAB. KARAWANG	PHE ONWJ	Arjuna	0,2378%	2.175.669.620.486	5.173.622.113
	KAB. MAJALENGKA	PT PERTAMINA EP	Jatibarang	0,5430%	2.496.152.515.094	13.553.929.356
	KAB. SUBANG					24.894.099.892
	KAB. SUBANG	PT PERTAMINA EP	Jatibarang	0,9973%	2.496.152.515.094	24.894.099.892
	KAB. SUBANG	PT PERTAMINA EP - KSO IEV PABUARAN	Jatibarang	0,0000%	2.496.152.515.094	-
	KAB. SUBANG	PT PERTAMINA EP (EXPL. JAWA)	Jatibarang	0,0000%	2.496.152.515.094	-



Menghitung DBH SDA Minyak bumi Berdasarkan Persentase di UU dan PP

Tujuan: Menghitung DBH bagian masing-masing daerah penghasil, bagian provinsi, dan kab/kota pemerataan.

Pada provinsi yang terdapat lebih dari satu daerah penghasil, maka masing-masing daerah penghasil memberi dan menerima pemerataan dari daerah penghasil yang lain.

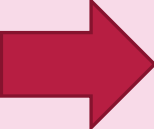
Contoh Hitung DBH Minyak Bumi Alokasi 15%

No.	Prov/Kab/Kota	PENERIMAAN SDA MINYAK BUMI	BAGIAN PUSAT	BAGIAN DAERAH	Alokasi DBH Kab/Kota Penghasil			Alokasi DBH Provinsi Penghasil		Total
					Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Pemerataan	Provinsi	Kab/Kota Pemerataan	
					3%	6%	6%	5%	10%	
			85%	15%						
X	JAWA BARAT	1.382.419.492.340	1.175.056.568.489	207.362.923.851	8.677.855.934	17.355.711.868	17.355.711.868	54.657.881.394	109.315.762.787	207.362.923.851
	Provinsi Jawa Barat	1.093.157.627.872	929.183.983.691	163.973.644.181				54.657.881.394	109.315.762.787	163.973.644.181
1	Kab. Bekasi	53.693.536.971	45.639.506.426	8.054.030.546	1.610.806.109	3.221.612.218	3.221.612.218			8.054.030.546
2	Kab. Indramayu	141.903.885.868	120.618.302.988	21.285.582.880	4.257.116.576	8.514.233.152	8.514.233.152			21.285.582.880
3	Kab. Karawang	55.216.412.381	46.933.950.524	8.282.461.857	1.656.492.371	3.312.984.743	3.312.984.743			8.282.461.857
4	Kab. Majalengka	13.553.929.356	11.520.839.953	2.033.089.403	406.617.881	813.235.761	813.235.761			2.033.089.403
5	Kab. Subang	24.894.099.892	21.159.984.909	3.734.114.984	746.822.997	1.493.645.994	1.493.645.994			3.734.114.984
	Provinsi Jawa Barat				8.677.855.934			54.657.881.394		63.335.737.328
1	Kab. Bandung						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
2	Kab. Bekasi					3.221.612.218	543.619.217		4.048.731.955	7.813.963.391
3	Kab. Bogor						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
4	Kab. Ciamis						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
5	Kab. Cianjur						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
6	Kab. Cirebon						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
7	Kab. Garut						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
8	Kab. Indramayu					8.514.233.152	340.056.874		4.048.731.955	12.903.021.981
9	Kab. Karawang					3.312.984.743	540.104.889		4.048.731.955	7.901.821.587
10	Kab. Kuningan						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
11	Kab. Majalengka					813.235.761	636.249.081		4.048.731.955	5.498.216.797
12	Kab. Purwakarta						667.527.380		4.048.731.955	4.716.259.335
13	Kab. Subang					1.493.645.994	610.079.457		4.048.731.955	6.152.457.405



Penyaluran ke Daerah

- Menyalurkan DBH tahun berjalan ke daerah untuk setiap triwulannya sesuai persentase yang diatur dalam PMK 50/PMK.07/2017.

TW I	: 25 %	}		APBN
TW II	: 25 %			
TW III	: $\leq 30\%$			APBN-P
TW IV	: sisa			Prognosis Realisasi



Gedung Radius Prawiro
Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443
www.djpk.depkeu.go.id